

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulanan 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi</i>					
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati	Persentase	80%	80%	100%	120%
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	75%	75%	75%	100%
III	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas</i>					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,66	120%

IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional yang Profesional					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	85%	85%	85%	100%

Kinerja Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi
----------	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi Regional yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati

Latar Belakang

Kerja sama ekonomi regional merupakan instrumen strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara mitra guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Sasaran strategis ini menekankan pentingnya kesepakatan dan implementasi kerja sama regional yang efektif, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

Ruang lingkup kerja sama regional yang dimaksud mencakup kesepakatan dalam forum kerja sama ekonomi regional yang dikoordinasi dan ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian, serta kesepakatan implementasi kerja sama ekonomi lainnya termasuk proyek strategis yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama kementerian/lembaga terkait.

Sasaran strategis ini menunjukkan hasil dari Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam bidang kerja sama regional. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi manfaat nyata dari kerja sama internasional dalam meningkatkan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

IKU ini mengukur tingkat efektivitas kerja sama ekonomi regional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator ini mencerminkan keberhasilan dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, mengendalikan kebijakan serta menindaklanjuti kerja sama ekonomi regional yang menghasilkan komitmen konkret.

Efektivitas kerja sama ekonomi regional diukur berdasarkan jumlah kesepakatan tertulis atau komitmen resmi yang disepakati. Komitmen tersebut merupakan kesepakatan yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dengan negara mitra pada forum regional di mana Kemenko Perekonomian menjadi koordinator dan ketua pelaksanaannya.

Target Jumlah Komitmen Kerja Sama Ekonomi Regional Tahun 2025 sebanyak 8 Komitmen sebagai berikut:

1. Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-47 dan ke-48
2. Rekomendasi Capaian Implementasi MEA 2025 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-25 dan ke-26
3. Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA
4. Joint Statement BIMP-EAGA Summit
5. Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT
6. Joint Statement IMT-GT Summit
7. Rekomendasi Hasil Pertemuan APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2025
8. Ministerial Meeting Joint Statement APEC SRMM

Adapun formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efektivitas (\%)} = \frac{\text{Jumlah Komitmen}}{\text{Target Komitmen (8)}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 80%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun target triwulan sebesar 80% ditentukan berdasarkan nasional kalender forum kerja sama regional tahun 2025 dan tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 120% dari target Tahun 2025 sebesar 80% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati Petrokimia yang mencapai target	Persentase	80%	100%	120% (Memuaskan)

Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati merupakan *direct cascading* dari Indikator Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melalui Jumlah Komitmen. IKU ini ditargetkan sebesar 80%. Sampai dengan laporan ini disusun, komitmen yang disepakati pada kerja sama ekonomi regional telah terlaksana sebesar 100%.

Komitmen yang Disepakati pada Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi Capaian Implementasi MEA 2025 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-26

Pertemuan AEC Council ke-26 telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2025 dalam Rangkaian KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia. Delegasi RI dipimpin oleh Menko Perekonomian selaku AEC Council Indonesia. Pertemuan diawali dengan pertemuan *Special AECC on DEFA* dan dilanjutkan pleno. Pertemuan membahas dan menyepakati perkembangan kerja sama ekonomi di kawasan, antara lain: 1) Perkembangan *Global and Regional Outlook*; 2) Perkembangan Penyelesaian PED Malaysia; 3) Implementasi *AEC Blueprint 2025*; 4) *ASEAN Community Vision 2045 and its Strategic Plan(s)*; 5) Implementasi Agenda Keberlanjutan ASEAN; 6) Transformasi Digital ASEAN; dan 7) Perkembangan Keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

Capaian besar pilar ekonomi yang dilaporkan kepada presiden yakni:

- Penyelesaian substansial ASEAN *Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) yang telah mencapai 73% dari target penyelesaian 70%. Negosiasi diharapkan dapat selesai pada April 2026 sehingga dapat segera melaksanakan *legal scrubbing* untuk kemudian ditandatangani pada Q4 tahun 2026.
- Para menteri mencatat bahwa ASEAN menghadapi sejumlah tantangan ekonomi serta ketidakpastian global. Beberapa rekomendasi untuk memperkuat daya saing regional melalui peningkatan ATIGA dan implementasi DEFA, memperluas kemitraan strategis dengan mitra seperti RCEP dan ASEAN plus one FTAs.
- Penyelesaian *Priority Economic Deliverables (PED) Malaysia* tahun 2025 sebanyak 17 dari 18 selesai dan 1 sisanya masih *on-going*. Beberapa diantaranya yakni *Second Protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* dan *ASEAN-China Free Trade Area 3.0. Upgrade Protocol*.
- Perkembangan penyelesaian AEC Blueprint 2025 secara keseluruhan per Oktober 2025 yakni 80% dan diproyeksikan mencapai 87% pada akhir Desember 2025.
- Evaluasi 10 tahun AEC Blueprint 2025 menunjukkan capaian implementasi yang kuat namun belum sepenuhnya memenuhi target, dengan rekomendasi penguatan tata kelola, koordinasi regional-nasional, pemantauan berbasis hasil, dan peningkatan pemanfaatan perjanjian ekonomi sebagai landasan transisi menuju AEC Strategic Plan 2026-2030.

- Kemajuan sektoral mencakup fasilitasi perdagangan dan kepabeanan, harmonisasi standar, jasa dan investasi, konektivitas pembayaran lintas batas, kebijakan persaingan, serta penguatan peran MSMEs.
- Inisiatif lintas sektor difokuskan pada keberlanjutan dan transisi hijau, transformasi digital, serta penguatan ketahanan rantai nilai global.

2. Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-28

Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-28 dilaksanakan pada tanggal 13-14 November 2025 di Davao, Filipina. Ketua Delegasi pada pertemuan tingkat Menteri adalah Konsul Jenderal RI Davao City, Agus Trenggono mewakili Menko Perekonomian selaku *Signing Minister* Indonesia untuk BIMP-EAGA. Anggota Delri terdiri atas perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, KJRI Davao City, dan KADIN.

Beberapa kesepakatan penting pada pertemuan Tingkat menteri antara lain:

- Mengapresiasi kinerja ekonomi sub-kawasan yang positif dengan kontribusi GDP BIMP-EAGA mencapai 18,13% dari total GDP BIMP;
- Mencatat kemajuan implementasi *Priority Infrastructure Projects* dengan total 217 proyek dan 60 proyek telah selesai, serta perkembangan konektivitas lintas batas;
- Mendorong penyelesaian kebijakan strategis lintas batas seperti reviu MoU on Air and Sea Linkages and Cross-Border Commercial Bus Routes, Inisiatif pengembangan interkonektivitas listrik dalam BIMP-Power Interconnection Projects, pengembangan pariwisata dengan Tourism Village Network, dan penguatan *people-to-people connectivity* dengan inisiatif *Friendship Games* dan Budaya Festival;
- Menyepakati penyelenggaraan BIMP-EAGA Special Summit 2026 dalam rangkaian ASEAN Summit di Cebu, Filipina, dengan agenda utama pengesahan dokumen perencanaan BEV2035;
- Menegaskan perlunya transformasi BIMP-EAGA menjadi ekosistem investasi, serta penguatan penyelarasan ASEAN Vision 2045 dan kerja sama dengan ADB dan mitra pembangunan lainnya.

3. Ministerial Meeting Joint Statement APEC SRMM

Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC (*APEC Structural Reform Ministerial Meeting/SRMM*) ke-4 telah diselenggarakan tanggal 22–23 Oktober 2025 di Ocean Tower, Inspire Entertainment Resort, Incheon, Republik Korea. Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri dan Ketua Delegasi dari 21 ekonomi anggota APEC, serta perwakilan dari ADB, IMF, PECC, PIF, UNCITRAL, dan UNIDROIT. Delegasi Indonesia diketuai oleh Wakil Menteri Perdagangan, mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Para Menteri mengeluarkan Pernyataan Bersama (*Joint Statement*) yang menegaskan komitmen terhadap Putrajaya Vision 2040 dan Aotearoa Plan of

Action, di bawah tema “*Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper*”. Para Menteri mencatat kemajuan implementasi *Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR) 2021-2025* yang mendorong reformasi kawasan. Meskipun demikian, hambatan struktural tetap ditemukan, termasuk ketidakselarasan regulasi, yang menghambat upaya untuk meningkatkan konektivitas, mendorong inovasi, dan mempromosikan kemakmuran di kawasan tersebut, sehingga para Menteri mengadopsi *Strengthened and Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (SEAASR) 2026-2030* dengan pilar serupa yang diperkuat:

- i. Enabling Fair, Market-Oriented Competition;
- ii. Enabling Environment for Doing Business;
- iii. Promoting Innovation and Digitalisation; dan
- iv. Empowering All to Achieve Their Economic Potential for Sustainable Economic Growth

Pernyataan bersama tersebut juga mendukung *Fourth APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan 2026-2035* dengan target peningkatan 20 persen di lima bidang prioritas, sambutan terhadap topik 2026 *APEC Economic Policy Report (AEPR)* tentang Reformasi Struktural dan Transformasi Digital Berbasis Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk berbagi praktik terbaik, serta penekanan pada reformasi layanan, kolaborasi lintas forum, sinergi dengan Menteri Keuangan, konektivitas, inklusi melalui pendidikan-kesehatan-keterampilan serta dukungan UMKM, dan keterlibatan sektor swasta yang lebih dalam. Para menteri menginstruksikan *Economic Committee* untuk menyusun Rencana Implementasi SEAASR dan melaporkan kemajuan di pertemuan pejabat senior serta menyambut Pertemuan Menteri berikutnya menjelang 2030 guna memantau capaian menuju visi jangka panjang.

Proyeksi Triwulan IV tahun 2025 tidak berbeda dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Triwulan IV dapat tercapai sesuai dengan nasional kalendar forum kerja sama regional tahun 2025 maka diprediksikan Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati dapat terlaksana sesuai *timeline* sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Efektivitas Kerja Sama Ekonomi Regional melalui Jumlah Komitmen yang Disepakati			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu

			dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan AEC Council ke-26	Terlaksana	Rapat persiapan substansi pertemuan AEC Council ke-26 telah dilaksanakan pada 16 Oktober 2025 secara <i>hybrid</i>
2.	Menghadiri Pertemuan AEC Council ke-26	Terlaksana	Pertemuan AEC Council ke-26 telah dilaksanakan pada 24 Oktober 2025 di Kuala Lumpur Malaysia
3.	Koordinasi Persiapan Substansi KTT ASEAN ke-47	Terlaksana	Persiapan substansi pertemuan KTT ASEAN ke-47 dilaksanakan dengan menyusun bahan pegangan Menko Perekonomian dalam rangka mendampingi Presiden RI pada KTT ASEAN ke-47 yang dilaksanakan pada tanggal 26-28 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia
4.	Menghadiri KTT ASEAN ke-47	Terlaksana	Rangkaian KTT ASEAN ke-47 dan KTT Terkait Lainnya telah dilaksanakan pada tanggal 26-28 Oktober 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Menko Perekonomian mewakili Bapak Presiden pada KTT AZEC ke-3 dan KTT RCEP ke-5.
5.	Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan	Terlaksana	Rapat koordinasi persiapan PTM BIMP-EAGA telah

	Tingkat Menteri BIMP-EAGA		dilaksanakan pada 3 November 2025 dengan mengundang perwakilan <i>working groups</i> dan Pemerintah daerah
6.	Menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA	Terlaksana	Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-28 telah dilaksanakan pada 13-14 November 2025 di Davao, Filipina dengan dihadiri Konsulat Jenderal RI untuk Davao City sebagai Ketua Delegasi pada pertemuan
7.	Koordinasi Persiapan Substansi Pertemuan Tingkat Menteri APEC SRMM	Terlaksana	Nota Dinas kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi No. KSI.04.02/115/D.II.M. EKON.3/09/2025 tanggal 10 September 2025 perihal Penyampaian Perkembangan Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC, 22-23 Oktober 2025, di Incheon, Republik Korea
8.	Menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri APEC SRMM	Terlaksana	Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC (APEC Structural Reform Ministerial Meeting/SRMM) ke-4 telah diselenggarakan tanggal 22–23 Oktober 2025 di

			Republik Korea. Delegasi Indonesia diketuai oleh Wakil Menteri Perdagangan, mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Pleno Sekretariat Nasional ASEAN pada 2 Oktober 2025.
2. 13th BIMP-EAGA Environment Cluster Meeting pada 6-7 Oktober 2025.
3. Menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Logistik KTT APEC pada 7 Oktober 2025.
4. Menghadiri Rapat Penyusunan Bahan Substansi Intervensi Presiden RI pada Rangkaian APEC *Economics Leaders Meeting*/KTT APEC pada 9 Oktober 2025.
5. Prep-SOM for BIMP-EAGA Ministerial Meeting pada 21 Oktober 2025.
6. BIMP-EAGA Working Level Meeting pada 29 Oktober 2025.
7. Menjadi Delegasi RI pada Rangkaian KTT APEC pada 31 Oktober - 1 November 2025.
8. Rapat Jaring Masukan dan Tindak Lanjut Implementasi Hasil KTT ASEAN ke-47 pada 3 Desember 2025.
9. BIMP-EAGA-ROK Working Level Meeting pada 11 Desember 2025.
10. Rapat Tindak Lanjut Pertemuan APEC 2025 terkait Isu Perdagangan pada 11 Desember 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pembatasan penugasan pegawai yang hadir menjadi DELRI pada pertemuan, menghadiri pertemuan secara virtual, dan pelaksanaan rapat persiapan dilaksanakan di dalam kantor secara *hybrid*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp28.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi AEC Strategic Plan yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2025 sehingga realisasi kinerja dapat melebihi target.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya **rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).**

Efektivitas tersebut diukur berdasarkan capaian terhadap tiga sub-komponen utama yang menjadi lingkup Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional, yaitu:

- 1) Penyelesaian Kesepakatan PTA/FTA/CEPA
 - Penandatanganan ACFTA 3.0 Upgrade Protocol
 - Penyelesaian dan Penandatanganan Protokol Kedua ATIGA upgrade
 - Kesepakatan Substansial Digital Economy Framework Agreement
- 2) Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian
 - Rekomendasi kepada Menteri Ekonomi ASEAN Hasil Pertemuan HLTF-EI ke-47 dan ke-48
 - Rekomendasi Capaian Implementasi MEA 2025 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-25 dan ke-26
 - Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA
 - Joint Statement BIMP-EAGA Summit
 - Joint Statement Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT
 - Joint Statement IMT-GT Summit
 - Rekomendasi Hasil Pertemuan APEC *Economic Committee* ke-1 dan ke-2 tahun 2025
 - Ministerial Meeting Joint Statement APEC SRMM
- 3) Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian
 - Penyelesaian Proses Penyusunan dan Pengesahan Protokol Kedua AANZFTA

Rekomendasi kebijakan yang dimaksud mencakup: penyelesaian komitmen yang telah disepakati, partisipasi aktif dalam forum regional, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil forum. Produk keluaran dari proses ini antara lain berupa: notula rapat, *policy brief*, dokumen rekomendasi kebijakan, laporan kegiatan, hingga laporan evaluasi kebijakan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun formula perhitungan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Persentase Tahapan Pertama

$$\text{Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Persentase Tahapan Kedua

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Persentase Tahapan Ketiga

$$\text{Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

4. Perhitungan Persentase Tahapan Keempat

$$\text{Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan ketiga} + \% \text{ Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 75%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun target triwulan sebesar 75% ditentukan berdasarkan nasional kalender forum kerja sama Regional tahun 2025 dan tren tahun sebelumnya.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional yang telah terealisasi sebesar 75% atau mencapai dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	75%	75%	100% (Memuaskan)

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional merupakan *direct cascading* dari Indikator Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 75%.

Persentase Efektivitas merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pada kerja sama ekonomi Regional. Sampai dengan laporan ini disusun, penyelesaian komitmen, keikutsertaan pada forum, dan implementasi kebijakan pada kerja sama ekonomi Regional telah terlaksana sebesar 75%.

Progress capaian kinerja pada Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Komitmen Kerja Sama Ekonomi PTA/FTA/CEPA

- Penandatanganan ACFTA 3.0 Upgrade Protocol

ASEAN – China *Free Trade Area 3.0 Upgrade* (ACFTA 3.0 Upgrade) merupakan pembaruan dari perjanjian ACFTA yang telah berlaku sejak 2010 dan bertujuan untuk memperluas kerja sama perdagangan. Perundingan ACFTA 3.0 Upgrade telah diselesaikan secara substansial melalui 9 putaran perundingan pada Februari 2023 – September 2024.

ACFTA menjadi salah satu hasil utama dari pelaksanaan KTT ASEAN ke-47. Menko Perekonomian mewakili Presiden RI menghadiri acara Penandatanganan ASEAN-China FTA 3.0 Upgrade di KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 28 Oktober 2025. Penandatanganan ACFTA menandai kemitraan ekonomi yang lebih inklusif dan komprehensif antara ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

ACFTA 3.0 Upgrade diharapkan dapat semakin memperkuat tren positif perdagangan ASEAN dan RRT, sekaligus mendorong diversifikasi ekspor, peningkatan nilai tambah industri, dan investasi yang lebih berkelanjutan melalui beberapa pengembangan kerja sama yang mencakup berbagai isu strategis dan terkini seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, konektivitas rantai pasok, pengembangan UMKM, perlindungan konsumen dan persaingan usaha.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia akan memulai proses ratifikasi dan penyelarasan kebijakan domestik, serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Dunia Usaha untuk memastikan manfaat optimal dari implementasi ACFTA 3.0 Upgrade.

- Penyelesaian dan Penandatanganan Protokol Kedua ATIGA upgrade

Upgrading perjanjian ATIGA bertujuan perjanjian ini lebih modern, fasilitatif terhadap pelaku bisnis, dan adaptif untuk menjawab berbagai tantangan regional dan global. Terdapat beberapa usulan bab baru pada *ATIGA Upgrade*, seperti Bab *Trade and Environment; Remanufactured Goods; Circular Economy; Supply Chain Connectivity; Trade in Humanitarian Crisis Situation; dan Micro, Small and Medium Enterprises* (MSMEs).

Penandatanganan Protokol Kedua ATIGA Upgrade ini merupakan salah satu *Priority Economic Deliverables* (PED) pada Keketuaan Malaysia tahun ini. Telah dilakukan sebanyak 15 kali pertemuan ATIGA *Trade Negotiating Committee* (TNC) dan 6 kali pertemuan intersesi TNC selama

proses negosiasi Protokol Kedua ATIGA *Upgrade*. Indonesia telah menandatangani naskah perjanjian Protokol Kedua ATIGA Upgrade di sela KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 Oktober 2025. Penandatanganan juga telah dilakukan oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sedangkan Kamboja dan Laos menandatangani secara *ad referendum*. Sementara itu, Myanmar dan Vietnam melakukan penandatanganan pada November 2025. Pasca penandatanganan teks perjanjian, *Handover Ceremony* dilakukan pada 26 Oktober 2025 oleh Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, selaku Ketua Dewan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

Upgraded ATIGA menjadi perjanjian perdagangan barang ASEAN yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi regional dan global. Peningkatan perjanjian ini juga memperkenalkan sejumlah elemen baru, antara lain ketentuan yang mendorong perdagangan berwawasan lingkungan; penguatan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); peningkatan konektivitas rantai pasok; serta penyediaan mekanisme alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan proses domestik retifikasi perjanjian agar Indonesia dapat segera memanfaatkan perjanjian. Selain itu perlunya dilakukan sosialisasi komitmen baru pada Protokol Kedua ATIGA *Upgrade* kepada seluruh pemangku kepentingan.

- **Kesepakatan Substansial Digital Economy Framework Agreement**
DEFA merupakan perjanjian regional pertama yang komprehensif di bidang ekonomi digital, yang akan menjadi dasar bagi terbentuknya ekosistem digital yang modern dan terintegrasi di kawasan ASEAN. Perjanjian ini juga memperkuat kerja sama dalam keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas akses ke pasar regional dan global.

Sejak diluncurkan pada 3 September 2023, perundingan DEFA telah melalui empat belas putaran pembahasan intensif, yang difasilitasi oleh Thailand sebagai Komite Perunding untuk DEFA, dengan kontribusi aktif seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Dalam rangka mendukung proses penyelesaian negosiasi ASEAN DEFA, Menko Perekonomian secara aktif memimpin delegasi RI dalam *Special ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting on DEFA* yang diselenggarakan pada 28 Agustus dan 24 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi forum penting dengan fokus pembahasan pada sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama negara ASEAN.

Pada pertemuan *2nd Special AECC Meeting on DEFA* tanggal 24 Oktober 2025, disampaikan capaian ASEAN atas kesepakatan substansial pada perundingan ASEAN DEFA putaran ke-14 yang telah dilaksanakan pada 7-10 Oktober 2025. Target penyelesaian substansial

70% dari *Core* dan *Value-Added* artiket telah tercapai, dengan 96 dari 131 paragraf berhasil disepakati yang mencapai 73%. Capaian ini merupakan salah satu *Priority Economic Deliverables* (PEDs) ASEAN di tahun 2025, sekaligus menandai langkah penting dalam penguatan kerja sama ekonomi digital kawasan di tengah transformasi global menuju ekonomi berbasis teknologi.

Negara-negara anggota ASEAN bersepakat untuk menyelesaikan dan menandatangani DEFA secara penuh pada tahun 2026, sehingga manfaat konkret dari kerja sama digital dapat segera dirasakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di kawasan.

2. Kesepakatan di Forum Kerja Sama Ekonomi Regional yang Dikoordinasikan dan Ditindaklanjuti Kemenko Perekonomian

- Pertemuan AEC Council ke-26

Pertemuan AEC Council ke-26 telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2025 dalam Rangkaian KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia. Delegasi RI dipimpin oleh Menko Perekonomian selaku AEC Council Indonesia. Pertemuan diawali dengan pertemuan *Special AEC on DEFA* dan dilanjutkan pleno. Pertemuan membahas dan menyepakati perkembangan kerja sama ekonomi di kawasan, antara lain: 1) Perkembangan *Global and Regional Outlook*; 2) Perkembangan Penyelesaian PED Malaysia; 3) Implementasi *AEC Blueprint 2025*; 4) *ASEAN Community Vision 2045 and its Strategic Plan(s)*; 5) Implementasi Agenda Keberlanjutan ASEAN; 6) Transformasi Digital ASEAN; dan 7) Perkembangan Keanggotaan Timor Leste di ASEAN.

- Tindak Lanjut Pertemuan HLTF-EI ke47 dan ke-48

Dalam rangka menindaklanjuti *AEC Strategic Plan 2026-2030* yang telah diadopsi oleh Para Pemimpin ASEAN di KTT ASEAN ke-46 di Kuala Lumpur pada tanggal 26 Mei 2025, Kemenko Perekonomian (c.q. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional) bekerja sama dengan ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan sosialisasi *AEC Strategic Plan 2026-2030* pada tanggal 13 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman bersama mengenai arah strategis AECSP 2026-2030 serta memastikan kontribusi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Kegiatan sosialisasi diselenggarakan secara *hybrid* melalui daring dan fisik di Auditorium Fisipol, Universitas Gadjah Mada serta dihadiri oleh sekitar 150 peserta. Peserta sosialisasi berasal dari berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga, Asosiasi Bisnis, Instansi pendidikan, Pelaku Usaha, Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi dan *Think Tank*.

Kegiatan sosialisasi diawali dengan penyampaian *agenda setting* oleh Sekretariat ASEAN dan dilanjutkan dengan diskusi panel. Sesi pertama diskusi panel membahas potensi pertumbuhan ekonomi melalui transformasi digital melalui penguatan pasar ASEAN yang terbuka. Sedangkan untuk sesi kedua diskusi panel berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi ASEAN melalui pemanfaatan *AEC Strategic Plan 2026-2030* dalam bidang investasi, riset dan UMKM.

Sosialisasi ini menegaskan bahwa pencapaian Visi ASEAN 2045 tidak hanya diwujudkan melalui sinergi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi, tetapi juga harus mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat luas. Dengan demikian, ASEAN tidak hanya mampu bertahan menghadapi gejolak global dalam skema kawasan, tetapi juga memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi kepentingan masing – masing warga negaranya.

- **Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-28**

Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-28 telah dilaksanakan pada tanggal 13-14 November 2025 di Davao, Filipina. Ketua Delegasi RI dalam pertemuan adalah Konsulat Jenderal RI untuk Davao City, Bapak Agus Trenggono. Pertemuan mengadopsi *BIMP-EAGA Joint Ministerial Statement* yang menegaskan capaian kerja sama subkawasan periode **2024–2025** serta memberikan arahan untuk mempercepat konektivitas, fasilitasi perdagangan, penguatan investasi, transformasi digital, serta pengembangan agribisnis dan pariwisata, dengan menekankan pentingnya konsolidasi lintas sektor dan pelibatan sektor swasta. Pertemuan juga memberikan arahan akhir terhadap penyempurnaan BIMP-EAGA Vision 2035 (BEV2035) sebagai kerangka pembangunan subkawasan jangka menengah, serta menyepakati bahwa BEV2035 akan diadopsi secara resmi pada BIMP-EAGA *Special Summit* tahun 2026 di Filipina, sejalan dengan rangkaian ASEAN Summit dan selaras dengan ASEAN *Vision 2045* serta *AEC Strategic Plan 2026–2030*.

- **Ministerial Meeting Joint Statement APEC SRMM**

Koordinasi persiapan Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC (*APEC Structural Reform Ministerial Meeting/SRMM*) diawali dengan penyampaian surat Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional No. B/KSI.04.01/83/D.II.M.EKON.3/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025, perihal Permohonan Masukan atas Zero Draft 2025 *APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) Joint Statement*. Selanjutnya, masukan dari Kementerian/Lembaga dihimpun sebagai lampiran untuk dilaporkan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi melalui Nota Dinas No. KSI.04.02/115/D.II.M.EKON.3/09/2025 tanggal 10 September 2025 perihal Penyampaian Perkembangan Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC, 22-23 Oktober 2025, di Incheon, Republik Korea.

Menindaklanjuti arahan atas Nota Dinas tersebut sebelumnya, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional menyampaikan Nota Dinas kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi No. KSI.04.01/141/D.II.M.EKON.3/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025 perihal Penyampaian Konsep Nota Dinas dan Surat kepada Wakil Menteri Perdagangan untuk Memimpin Delegasi RI pada APEC *Structural Reform Ministerial Meeting* (SRMM) di Incheon, Korea Selatan, 22 s.d. 23 Oktober 2025. Hasil akhir atas Nota Dinas tersebut adalah Surat Sesmenko Perekonomian kepada Wakil Menteri Perdagangan No. KSI.04.01/338/SES.M.EKON/10/2025 tanggal 10 Oktober 2025 perihal Permohonan untuk Mewakili dan Memimpin Delegasi RI ke Pertemuan APEC SRMM. Surat tersebut ditanggapi oleh Surat Dinas Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Perdagangan No. TU.04/1025/SJ-DAG.5/SD/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang mengonfirmasi kehadiran Wakil Menteri Perdagangan ke SRMM.

Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC (*APEC Structural Reform Ministerial Meeting/SRMM*) ke-4 telah diselenggarakan tanggal 22–23 Oktober 2025 di Ocean Tower, Inspire Entertainment Resort, Incheon, Republik Korea. Pertemuan ini dihadiri oleh para Menteri dan Ketua Delegasi dari 21 ekonomi anggota APEC, serta perwakilan dari ADB, IMF, PECC, PIF, UNCITRAL, dan UNIDROIT. Delegasi Indonesia diketuai oleh Wakil Menteri Perdagangan, mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Para Menteri mendiskusikan dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- Peran **reformasi struktural** dalam menghadapi tantangan ekonomi global, transformasi digital, dan transisi hijau.
- Menyepakati Inisiatif **Strengthened and Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (SEAASR) 2026–2030**.
- Mendukung **SRMM Joint Ministerial Statement** yang memuat komitmen untuk melanjutkan reformasi struktural melalui agenda SEAASR 2026–2030 guna mendorong persaingan sehat, kemudahan berusaha, inovasi digital, serta pemberdayaan inklusif demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Pada akhir pertemuan, para Menteri mengadopsi *SRMM Joint Ministerial Statement* yang memuat komitmen untuk melanjutkan reformasi struktural melalui agenda SEAASR 2026–2030 dengan lampiran *APEC Fourth Ease of Doing Business Action Plan (2025–2035)*. Target yang ingin dicapai adalah peningkatan 20% pada lima area prioritas: (i) *Business Entry*; (ii) *Financial Services*; (iii) *Business Location*; (iv) *Market Competition*; dan (v) *Dispute Resolution*, dengan *baseline* data indikator baru World Bank B-Ready pada 2026.

Monitoring dan evaluasi atas rangkaian kegiatan SRMM telah dilaksanakan melalui Sosialisasi Hasil KTT APEC 2025 dan Pelatihan Penyusunan Concept Note untuk APEC Project, Bandung, 17 Desember 2025, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri. Pada sosialisasi tersebut, perwakilan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi

Regional menyampaikan hasil SRMM serta mendorong optimalisasi pemanfaatan pendanaan APEC melalui proyek yang sesuai dengan substansi pada forum APEC *Economic Committee*, yang mana Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional sebagai Kementerian/Lembaga pengampu (*focal point*) forum tersebut.

3. Implementasi Kerja Sama Ekonomi Regional di Bawah Pengendalian Kemenko Perekonomian

- **Penyelesaian Proses Penyusunan dan Pengesahan Protokol Kedua AANZFTA**

ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) merupakan perjanjian perdagangan bebas yang bersifat komprehensif dan menggunakan pendekatan *single undertaking*. Sejalan dengan *ASEAN Community Vision 2025*, AANZFTA bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembentukan rezim perdagangan dan investasi yang lebih liberal, fasilitatif, dan transparan di antara dua belas negara pihak.

Pemerintah menindaklanjuti hasil pembahasan dengan DPR RI terkait Protokol Kedua AANZFTA dengan menyepakati pengesahannya melalui Peraturan Presiden. Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tersebut, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional, Kemenko Perekonomian berperan aktif sebagai anggota Panitia Antar Kementerian (PAK). Sepanjang tahun 2025, Kemenko Perekonomian bersama kementerian dan lembaga terkait mengikuti rangkaian rapat tindak lanjut ratifikasi dan rapat PAK yang membahas substansi RPerpres, termasuk implikasi di bidang perdagangan, investasi, kepabeanan, dan regulasi terkait.

Sebagai tahap akhir, RPerpres tentang Pengesahan Protokol Kedua AANZFTA telah dibahas dalam Rapat Pleno Harmonisasi pada 24 Oktober 2025 dan secara substansial telah disepakati, menunggu penyelesaian administrasi hasil harmonisasi di Kementerian Hukum. Dengan selesainya tahapan tersebut, proses pengesahan berada pada tahap akhir penetapan, sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasional serta memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN, Australia, dan Selandia Baru.

Proyeksi Triwulan IV tahun 2025 tidak berbeda dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Triwulan dapat tercapai sesuai dengan nasional kalender forum kerja sama Regional tahun 2025 yang terlaksana sesuai *timeline* sehingga target tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyelesaian Komitmen, Keikutsertaan pada Forum dan Implementasi Kebijakan pada Kerja Sama Ekonomi Regional			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penandatanganan ACFTA 3.0 Upgrade Protocol	Terlaksana	Penandatanganan ASEAN-China FTA 3.0 Upgrade telah dilaksanakan di KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 28 Oktober 2025
2.	Penandatanganan ATIGA upgrade	Terlaksana	Indonesia telah menandatangani naskah perjanjian Protokol Kedua ATIGA Upgrade di sela KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 Oktober 2025
3.	Menyelesaikan substansi negosiasi DEFA	Terlaksana	Pada pertemuan <i>2nd Special AECC Meeting on DEFA</i> tanggal 24 Oktober 2025, disampaikan capaian ASEAN atas kesepakatan substansial pada perundingan ASEAN DEFA putaran ke-14 yang telah dilaksanakan pada 7-10 Oktober 2025

4.	Rapat Persiapan Substansi Pertemuan AEC Council ke-26	Terlaksana	Rapat persiapan substansi pertemuan AEC Council ke-26 telah dilaksanakan pada 16 Oktober 2025 secara <i>hybrid</i>
5.	Menghadiri Pertemuan AEC Council ke-26	Terlaksana	Pertemuan AEC Council ke-26 telah dilaksanakan pada 24 Oktober 2025 di Kuala Lumpur Malaysia
6.	Menyusun Laporan Capaian Implementasi MEA 2025 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-26	Terlaksana	Penyusunan Laporan Capaian Implementasi MEA 2025 kepada Presiden Hasil Pertemuan AEC Council ke-26 telah dilaksanakan pada 24 Oktober 2025
7.	Koordinasi persiapan Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-28	Terlaksana	Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-28 telah dilaksanakan pada 13-14 November 2025 di Davao, Filipina dengan dihadiri Konsulat Jenderal RI untuk Davao City sebagai Ketua Delegasi pada pertemuan
8.	Menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-28	Terlaksana	Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-28 telah dilaksanakan pada 13-14 November 2025 di Davao, Filipina dengan dihadiri Konsulat Jenderal RI untuk Davao City sebagai Ketua Delegasi pada pertemuan

9.	Menyusun Rekomendasi Hasil Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-28	Terlaksana	Penyusunan rekomendasi telah dilaksanakan sesuai dengan laporan hasil pertemuan nomor B/KSI.04.02/531/D.II.M.EKON.3/11/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Penyampaian Hasil Pertemuan dan Brafaks Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-28
10.	Koordinasi persiapan pertemuan APEC SRMM	Terlaksana	Nota Dinas kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi No. KSI.04.02/115/D.II.M.EKON.3/09/2025 tanggal 10 September 2025 perihal Penyampaian Perkembangan Persiapan Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC, 22-23 Oktober 2025, di Incheon, Republik Korea
11.	Penyampaian rekomendasi untuk pertemuan APEC SRMM	Terlaksana	Nota Dinas kepada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi No. KSI.04.01/141/D.II.M.EKON.3/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025 perihal Penyampaian Konsep Nota Dinas dan dan Surat kepada Wakil Menteri Perdagangan untuk Memimpin

			Delegasi RI pada APEC <i>Structural Reform Ministerial Meeting</i> (SRMM) di Incheon, Korea Selatan, 22 s.d. 23 Oktober 2025
12.	Menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri APEC SRMM	Terlaksana	Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC (APEC Structural Reform Ministerial Meeting/SRMM) ke-4 telah diselenggarakan tanggal 22–23 Oktober 2025 di Republik Korea. Delegasi Indonesia diketuai oleh Wakil Menteri Perdagangan, mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
13.	Monitoring dan evaluasi kesepakatan dalam kerja sama APEC	Terlaksana	Sosialisasi Hasil KTT APEC 2025 dan Pelatihan Penyusunan Concept Note untuk APEC Project, Bandung, 17 Desember 2025
14.	Rapat Pleno Harmonisasi RPerpres Pengesahan Protokol Kedua AANZFTA	Terlaksana	Rapat Pleno Harmonisasi RPerpres Pengesahan Protokol Kedua AANZFTA telah dilaksanakan pada 24 Oktober 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri Rapat Pleno Sekretariat Nasional ASEAN pada 2 Oktober 2025.

2. 13th BIMP-EAGA Environment Cluster Meeting pada 6-7 Oktober 2025.
3. Perundingan ASEAN-DEFA ke-14 pada 7-10 Oktober 2025.
4. Menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Logistik KTT APEC pada 7 Oktober 2025.
5. Menghadiri Rapat Penyusunan Bahan Substansi Intervensi Presiden RI pada Rangkaian APEC *Economics Leaders Meeting*/KTT APEC pada 9 Oktober 2025.
6. Rapat Persiapan Sosialisasi AEC Strategic Plan dengan UGM pada 10 Oktober 2025.
7. Pelaksanaan Sosialisasi AEC Strategic Plan pada 13 Oktober 2025.
8. Prep-SOM for BIMP-EAGA Ministerial Meeting pada 21 Oktober 2025.
9. BIMP-EAGA Working Level Meeting pada 29 Oktober 2025.
10. Menjadi Delegasi RI pada Rangkaian KTT APEC pada 31 Oktober - 1 November 2025.
11. Perundingan ASEAN-DEFA ke-14 pada 25-27 November 2025.
12. Rapat Jaring Masukan dan Tindak Lanjut Implementasi Hasil KTT ASEAN ke-47 pada 3 Desember 2025.
13. BIMP-EAGA-ROK Working Level Meeting pada 11 Desember 2025
14. Menghadiri FGD Potensi Pemanfaatan Perjanjian 2nd Protocol ATIGA dan ACFTA 3.0 Upgrade pada 15 Desember 2025.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan; (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan

empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Indeks Kepuasan} \\ & \text{Layanan Koordinasi,} \\ & \text{Sinkronisasi dan} \\ & \text{Pengendalian} \end{aligned} = \frac{\Sigma \text{Rerata jawaban dari masing-masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Tahun 2025. Adapun target Triwulan IV sebesar 3 dari 4 yang akan dicapai oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dalam pelayanan unit kerja dengan Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, telah dilaksanakan dua kali survei Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional untuk periode semester I dan II tahun 2025, dimana survei telah dilaksanakan pada Triwulan II dan IV. Pada triwulan IV, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional telah terealisasi sebesar 3,66 dari 4 atau mencapai 120% dari target Tahun 2025 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional	Indeks	3 dari 4	3,66	120 % (Memuaskan)

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional pada tahun 2025 ditargetkan sebesar indeks 3 dari 4. Sampai dengan laporan ini disusun, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional telah melakukan survei Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional Semester I dan II Tahun 2025. Berdasarkan penarikan hasil survei, diperoleh indeks kepuasan sebesar 3,66 dari 24 responden artinya telah mencapai 120% dari target Baik (3 dari 4).

Proyeksi Triwulan IV tahun 2025 tidak berbeda dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Triwulan IV didorong oleh partisipasi aktif K/L mitra kerja dalam mengisi survei, sehingga data yang diperoleh menggambarkan persepsi dan pengalaman nyata mereka dalam berkoordinasi dengan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional.

Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner secara online dengan mempertimbangkan efektifitas pelaksanaan survei dan pengisian jawaban, serta rekapitulasi hasil survei karena dilakukan secara serentak dalam satu tempat dan rentang waktu yang sama.

Responden diberikan petunjuk mengenai tata cara pengisian survei guna meminimalisir kesalahan teknis pada waktu mengisi kuesioner tersebut. Hasil pelaksanaan survei yakni berupa nilai indeks kepuasan yang diperoleh dari rata-rata hasil kuesioner yang telah dilengkapi oleh responden, dengan empat kategori penilaian yakni (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas. Hasil dari pelaksanaan survei tersebut berupa tindaklanjut atas perbaikan layanan.

Adapun responden yang dapat berpartisipasi pada survei ini adalah seluruh pejabat/pegawai baik ASN maupun Non ASN di lingkungan Kemenko Perekonomian, K/L dan/atau stakeholder terkait. Namun survei ini dikecualikan bagi pejabat/pegawai pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan objektivitas penilaian survei.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di Bidang Kerja Sama	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyampaian form survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di

	Ekonomi Regional Semester II		Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional Semester I kepada K/L terkait dan telah diperoleh nilai indeks kepuasan sebesar 3,66.
--	------------------------------	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah diantaranya:

1. Menyebarkan form survei sebanyak-banyaknya kepada K/L terkait agar diperoleh minimal 20 responden.
2. Melakukan reminder secara berkala kepada responden survei untuk berpartisipasi dalam kegiatan survei.

4

Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional yang Profesional

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional yang Profesional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu: Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional
Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 85%, dengan penetapan target tahun 2025 didasarkan pada RKP 2025 dan dokumen perencanaan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional. Adapun target triwulan sebesar 85% ditetapkan berdasarkan tren progress atas cascading dari Program Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional telah terealisasi sebesar 85% atau mencapai 100% dari target Tahun 2025 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional	Persentase	85%	85%	100% (Memuaskan)

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional ditargetkan sebesar 85%. Sampai dengan laporan ini disusun, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah terealisasi sebesar 85%.

Proyeksi Triwulan IV tahun 2025 tidak berbeda dibandingkan realisasi Triwulan IV tahun 2024. Realisasi Triwulan IV didorong oleh pemenuhan cascading atas target Reformasi Birokrasi dari Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Mengingat hal tersebut, maka target penyelenggaraan Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional tahun 2025 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional			
No	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan

			(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan laporan kinerja triwulan IV.
4.	Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
5.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI untuk pemrosesan surat dan disposisi secara rutin selama Triwulan IV.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengisian Sistem Monitoring dan Evaluasi RB Tematik Triwulan I s.d. IV Tahun 2025.
2. Melakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Perbedaan prioritas kebijakan dan kesiapan teknis antar K/L menyebabkan proses sinkronisasi substansi dan tindak lanjut komitmen internasional membutuhkan waktu lebih panjang.
2. Negosiasi perjanjian yang bersifat baru dan kompleks (misalnya DEFA, ATIGA Upgrade, ACFTA 3.0 Upgrade) memerlukan penyesuaian dengan regulasi domestik yang belum sepenuhnya selaras.
3. Proses harmonisasi dan ratifikasi perjanjian internasional (misalnya Protokol Kedua AANZFTA) masih memerlukan waktu cukup panjang karena tahapan lintas instansi.
4. Keterbatasan jumlah SDM yang menangani banyak forum secara paralel berdampak pada beban kerja tinggi, terutama pada periode puncak KTT dan pertemuan tingkat menteri.

5. Keterbatasan anggaran mendorong pembatasan jumlah delegasi dan intensitas pertemuan tatap muka.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi lintas K/L secara berjenjang, termasuk melalui *early circulation* dokumen substansi dan penyusunan posisi nasional lebih awal sebelum forum tingkat menteri.
2. Mengintegrasikan hasil forum regional ke dalam perumusan kebijakan nasional, dengan memastikan tindak lanjut hasil pertemuan dimasukkan dalam agenda rapat koordinasi lintas sektor.
3. Mengoptimalkan efisiensi sumber daya dengan memperluas pemanfaatan partisipasi virtual dan pembagian peran antar unit kerja agar representasi Indonesia di forum regional tetap maksimal.
4. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan layanan dengan perbaikan prosedur, kejelasan alur koordinasi, dan kecepatan respons.

Jakarta, 14 Januari 2026

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi
Regional



Bobby Chriss Siagian